



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Terpadu No.... Telp / Fax. (0763) 33151
SELATPANJANG

KodePos 28753

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 460/DINSOSP3AP2KB/Kpts/XII/2023/1669

TENTANG

**PENILAIAN RISIKO PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Resiko pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu di atur dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penilaian Risiko Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.

KESATU : Data Penilaian Resiko pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Selatpanjang
Tanggal, 20 Desember 2023

**Plt. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



SUKRI, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19800401 200012 1 001


PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: 1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Sumber Data	Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti		
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesetaraan Gender		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS 2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk 3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
IKU Renstra OPD	IKU		
	1	Persentase PPKS yang tertangani	2024 89%
	2	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	1,51
	3	Cakupan perempuan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	100%
	4	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	8,72%
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Kesetaraan Gender <p>Sasaran Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <p>IKU Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> Persentase PPKS yang tertangani Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) Cakupan perempuan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 		
		<p>Selat Panjang, 20 Desember 2023</p> <p>Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>  <p>SUKRI, SE Pembina / (IV.a) NIP. 19800401 200012 1 001</p>	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	
Tahun Penilaian	: 2024	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: 1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
OPD yang Dinilai	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Sumber Data	Renja Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024	
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesenjangan Gender	
Program Dinas SosialP3AP2KB (Renja 2024) dan Kegiatan Utama	Program : 1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Penanganan Bencana 5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 6. Program Perlindungan Perempuan 7. Program Perlindungan Khusus Anak 8. Program Pengendalian Penduduk 9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Keluaran	Target
	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga
	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga
	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5.000 Orang
	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	10.000 Orang
	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.097 Keluarga
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang
Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	

	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	40 Orang
	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	9 Kegiatan
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Laporan
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13 Laporan
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.034 Orang
Informasi Lain		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan :	1 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
		2 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
		3 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		4 Penyediaan Perumahan
		5 Penyediaan Sandang
		6 Penyediaan Alat Bantu
		7 Pemberian Layanan Rujukan
		8 Pemberian Layanan Rujukan
		9 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		10 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		11 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		12 Penyediaan Makanan
		13 Penyediaan Sandang
		14 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
		15 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		16 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		17 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
		18 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
		19 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
		20 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		21 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Indikator Keluaran :	Indikator Keluaran :	1 Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
		2 Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
		3 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		4 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
		5 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
		6 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
		7 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
		8 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
		9 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
		10 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
		11 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		12 Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota

	<p>13 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>14 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>15 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</p> <p>16 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>17 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan</p> <p>18 Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga</p> <p>19 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga</p> <p>20 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan</p> <p>21 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p>
	<p>Selat Panjang, 20 Desember 2023</p> <p>Pt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>  <p>SUKRI, SE Pembina / (IV.a)</p> <p>NIP. 19800401 200012 1 001</p>

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti								
Nama OPD	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
Tahun Penilaian	: 2024								
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2021-2026								
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesetaraan Gender								
Urusan Pemerintahan	: 1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Sosial) 2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)								
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat								
	Sasaran OPD : Meningkatnya Penanganan Terhadap PPKS								
	Program : Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani	Belum maksimalnya pemetaan jumlah Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menyebabkan masih adanya Komunitas Adat Terpencil yang belum Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah	RSO.1.06.2.08.2.14.01.01	Kepala Bidang Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Informasi tentang sebaran Komunitas Adat Terpencil. • Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang Sarjana Kesejahteraan Sosial 	Eksternal	Masyarakat KAT yang seharusnya mendapatkan layanan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil menjadi tidak terjangkau dikarenakan belum terpetakan sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Masyarakat KAT dan Dinas Sosial SosialP3AP2KB
			Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum maksimal	RSO.1.06.2.08.2.14.01.02	Kepala Bidang Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang Koordinasi antara PSKS dan Dinas Sosial • Kurangnya Pembekalan terkait Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah. 	Internal	Pemberdayaan Sosial yang di berikan kepada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menjadi tidak Optimal	Masyarakat PPKS dan Dinas Sosial SosialP3AP2KB

Program : Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia Terlantar yang terdata untuk pelayanan Rehabilitasi Sosial belum semuanya mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	RSO.1.06.2.08.2.14.01.03	Kepala Bidang Sosial	Jumlah Anggaran Daerah untuk pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia Terlantar tidak mencukupi untuk melayani seluruh jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia Terlantar yang terdata	Internal	Tidak terpenuhinya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar kepada seluruh Penyandang Disabilitas dan Lansia terlantar yang terdata	Masyarakat penyandang Disabilitas dan Lansia Terlantar Serta Dinas Sosial SosialP3AP2KB
Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Masih adanya Keluarga Penerima Manfaat yang belum mendapatkan bantuan	RSO.1.06.2.08.2.14.01.04	Kepala Bidang Sosial	Update data penerima bantuan dilakukan By Sistem secara Random, sehingga usulan yang diajukan tidak serta merta langsung menjadi penerima bantuan dari pemerintah pusat	Internal	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah masuk kedalam Data DTKS masih ada yang belum mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Pusat	Masyarakat Miskin dan Dinas SosialP3AP2KB
Program : Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	Keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	RSO.1.06.2.08.2.14.01.05	Kepala Bidang Sosial	Terlambatnya laporan tentang Kejadian Bencana yang masuk	Internal	Pelayanan terhadap Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial mengalami Keterlambatan	Korban Bencana dan Dinas SosialP3AP2KB
Sasaran OPD : Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk								
Program : Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang disusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen GDPK yang di manfaatkan untuk pengambilan ke kebijakan	RSO.1.06.2.08.2.14.01.06	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Minimnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan Dokumen GDPK	Internal	Terlambatnya pemanfaatan GDPK yang mestinya di gunakan dalam pengambilan Kebijakan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Stakeholder terkait

	Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi digudang alokon Kabupaten Kepulauan Meranti tidak mencukupi untuk di salurkan ke Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya	RSO.1.06.2.08. 2.14.01.07	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Keterlambatan dalam pengiriman logistik Obat dan Alat Kontrasepsi dari BKKBN pusat ke Gudang Alokon di Daerah	Eksternal	Terjadi keterlambatan distribusi alokon dari Gudang Alokon Daerah ke faskes dan jejaringnya yang menyebabkan tidak tercapainya target CPR	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Faskes dan Jejaringnya 3. Masyarakat Pasangan usia Subur (PUS)
	Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Masih Rendahnya Pemahaman dan dukungan dari pada Stake Holder dalam pelaksanaan PUG	RSO.1.06.2.08. 2.14.01.09	Kepala Bidang Pemberday aan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum adanya Kebijakan terkait pelaksanaan PUG pada lembaga pemerintah di Kabupaten Kepulauan Meranti	Internal	Rendahnya Penilaian APE dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender	1. Pemerintah Daerah 2. Dinas SosialP3AP2KB
	Program : Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan konprehensif	Belum Optimalnya Layanan Perlindungan Perempuan yang di berikan	RSO.1.06.2.08. 2.14.01.10	Kepala Bidang Pemberday aan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak tersedianya Tenaga Ahli yang menangani Pelayanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti	Internal	Pelayanan yang di berikan Memakan Waktu Cukup Lama	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Perempuan Korban Kekerasan

	Program : Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan konfhensif	Belum Optimalnya Layanan Perlindungan Khusus Anak yang di berikan	RSO.1.06.2.08.2.14.01.11	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak tersedianya Tenaga Ahli yang menangani Pelayanan Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Kepulauan Meranti	Internal	Pelayanan yang di berikan Memakan Waktu Cukup Lama	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Selatpanjang, 20 Desember 2023

Disetujui oleh :

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kepulauan Meranti



SUKRI, SE

NIP. 19800401 200012 1 001

Selatpanjang, 20 Desember 2023

Dibuat Oleh Pemilik Risiko :

1. Kepala Bidang Sosial


NURHABIBI, SE

NIP. 19770122 201102 1 001

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


DESY MUSTIKA SANDRA, S.Sos

NIP. 19821212 201001 2 043

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


NURHAYANTO, S.Pd.SD

NIP. 19680512 199303 1 010

Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti									
Nama OPD	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
Tahun Penilaian	: 2024									
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD 2021-2026									
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesetaraan Gender									
Sasaran strategis OPD	: 1. Meningkatnya Penanganan terhadap PPKS 2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk 3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
Urusan Pemerintahan	: 1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Sosial) 2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)									
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Program : Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS dan KAT yang ditangani : 80 %								
	Kegiatan 1: Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Cakupan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil : 45 %								
	Sub Kegiatan 1.1: Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota : 30 Keluarga	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT)	ROO.1.06.2.08.2.14.01.01	Kepala Bidang Sosial	Tidak adanya bahan-bahan material terkait pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tersedia di lokasi kegiatan sehingga perlu membeli dari luar dengan akses yang susah	Eksternal	Layanan pemberdayaan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat KAT
	Sub Kegiatan 1.2: Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota : 30 Keluarga	Pelaksanaan	Jumlah KAT yang mendapatkan Peningkatan kapasitas tidak sesuai dengan total seluruh Perkiraan Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di kabupaten Kepulauan Meranti	ROO.1.06.2.08.2.14.01.02	Kepala Bidang Sosial	Jumlah Anggaran Daerah yang diperlukan untuk Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan tidak mencukupi	Internal	Target kinerja untuk peningkatan kapasitas seluruh KAT di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak tercapai	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat KAT

	Kegiatan 2 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas : 73 %								
	Sub Kegiatan 2.1 : Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota : 115 Orang	Pelaksanaan	Peserta Bimbingan Teknis terkait Peningkatan Kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat kurang memahami terkait tugas dan fungsi dari pada Pekerja Sosial Masyarakat tersebut	ROO.1.06.2.08.2.14.01.03	Kepala Bidang Sosial	Belum adanya Petunjuk Pelaksanaan terkait tugas dan fungsi dari pada Pekerja Sosial Masyarakat	Internal	Pelayanan yang di berikan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat 3. PSM
2	Program : Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang terdata dan Direhabilitasi : 30.178 Orang								
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial : 37 %								
	Sub Kegiatan 1.1 : Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota : 200 Orang	Pelaksanaan	Waktu Penyaluran Permakanan kepada Penyandang Disabilitas dan Lansia tidak sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan	ROO.1.06.2.08.2.14.01.04	Kepala Bidang Sosial	Kendaraan Operasional yang seharusnya di gunakan untuk penyaluran bantuan mengalami kerusakan	Internal	Layanan penyediaan permakanan yang di berikan kepada penyandang disabilitas dan lansia mengalami keterlambatan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Penyandang Disabilitas 3. Lansia terlantar 4. Anak terlantar 5 Gepeng

Sub Kegiatan 1.2 : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota : 100 Orang	Pelaksanaan	Waktu Penyaluran Sandang kepada Penyandang Disabilitas dan Lansia tidak sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan	ROO.1.06.2.08.2.14.01.05	Kepala Bidang Sosial	Kendaraan Operasional yang seharusnya di gunakan untuk penyaluran bantuan mengalami kerusakan	Internal	Layanan penyediaan Sandang yang di berikan kepada penyandang disabilitas dan lansia mengalami keterlambatan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Penyandang Disabilitas 3. Lansia terlantar 4. Anak terlantar 5 Gepeng
Sub Kegiatan 1.3 : Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota : 17 Orang	Persiapan/ perencanaan/ panganggaran	Barang tidak sesuai dengan Penerima Manfaat	ROO.1.06.2.08.2.14.01.06	Kepala Bidang Sosial	Keterlambatan dalam melakukan Asesment terhadap calon penerima manfaat	Internal	Penerima Manfaat harus menunggu lagi untuk mendapatkan alat bantu yang sesuai	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Penyandang Disabilitas 3. Lansia terlantar
Sub Kegiatan 1.4 : Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota : 50 Orang	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam penyediaan kelengkapan administrasi pemberian layanan rujukan	ROO.1.06.2.08.2.14.01.07	Kepala Bidang Sosial	Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait persyaratan layanan administrasi untuk pemberian layanan rujukan	Internal	Proses yang diperlukan dalam pemberuan layanan rujukan kepada masyarakat menjadi panjang	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Penyandang Disabilitas 3. Lansia terlantar 4. Anak terlantar 5 Gepeng
Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial : 100 %								
Sub Kegiatan 1.1 : Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota : 65 Orang	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam penyediaan kelengkapan administrasi pemberian layanan rujukan	ROO.1.06.2.08.2.14.01.08	Kepala Bidang Sosial	Kurangnya informasi kepada masyarakat terkait persyaratan layanan administrasi untuk pemberian layanan rujukan		Proses yang diperlukan dalam pemberuan layanan rujukan kepada masyarakat menjadi panjang	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. PMKS

3	Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial : 85 %								
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah Padan dengan data Kependudukan : 91 %								
	Sub Kegiatan 1.1 : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata : 5.000 Orang	Pelaksanaan	Pendataan yang di lakukan kepada Fakir Miskin tidak tepat sasaran	ROO.1.06.2.08.2.14.01.09	Kepala Bidang Sosial	Belum adanya Regulasi yang mengatur tentang kriteria masyarakat yang dapat di masukkan kedalam Pendataan Fakir Miskin	Internal	Masih ada masyarakat miskin yang belum masuk kedalam data terpadu kesejahteraan sosial sehingga tidak mendapat bantuan dari pemerintah	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat Miskin 3. Stakeholders lainnya
	Sub Kegiatan 1.2 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota : 10.000 Keluarga	Pelaporan	Laporan pendamping PKH yang disampaikan ke dinas belum optimal	ROO.1.06.2.08.2.14.01.10	Kepala Bidang Sosial	Tidak adanya Format baku terkait laporan yang harus di sampaikan Pendamping PKH ke Dinas	Internal	Kualitas pelaporan yang di sampaikan belum sesuai standar	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Pendamping PKH
	Sub Kegiatan 1.3 : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota : 1.097 Orang	Pelaksanaan	Adanya Masyarakat miskin yang menerima bantuan Sosial Ganda baik dari Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah	ROO.1.06.2.08.2.14.01.11	Kepala Bidang Sosial	Jumlah KPM yang menjadi sasaran di ambil dari data DTKS Non Bansos ketika waktu perencanaan bantuan, namun ketika waktu pelaksanaan ada kemungkinan KPM tersebut telah menerima Bantuan Sosial dari Pusat	Internal	Realisasi dari pada pemberian bantuan sosial yang di berikan tidak sesuai dengan target yang telah di tetapkan	1. Dinas SosialP3AP2KB
4	Program : Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan : 90 %								

	Kegiatan 1 : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat : 100 %								
	Sub Kegiatan 1.1 : Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota : 290 Orang	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	ROO.1.06.2. 08.2.14.01.1 2	Kepala Bidang Sosial	Tidak adanya Transportasi untuk Operasional penyaluran Bencana yang dimiliki Oleh Dinas	Internal	Pelayanan terhadap Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial mengalami Keterlambatan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Korban Bencana
	Sub Kegiatan 1.2 : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota : 140 Orang	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	ROO.1.06.2. 08.2.14.01.1 3	Kepala Bidang Sosial	Tidak adanya Transportasi untuk Operasional penyaluran Bencana yang dimiliki Oleh Dinas	Internal	Pelayanan terhadap Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial mengalami Keterlambatan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Korban Bencana
5	Program : Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Dokumen Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) yang tersusun dan dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan : 1 %								

	Kegiatan 1 : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk : 3 Kegiatan								
	Sub Kegiatan 1.1 : Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga : 9 Kegiatan	Pelaksanaan	Minimnya narasumber yang tersedia di OPD	ROO.1.06.2.08.2.14.01.14	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurang nya pengetahuan petugas terhadap hasil pemutakhiran data keluarga	Internal	Penyadian data dalam Saresehan tidak optimal	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Stakeholder terkait
6	Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)									
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal : 6 Kegiatan								
	Sub Kegiatan 1.1 : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) : 9 Laporan	Pelaksanaan	Kualitas Penyuluhan yang di berikan tidak sesuai standar	ROO.1.06.2.08.2.14.01.15	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurang nya pengetahuan petugas terhadap standar pembinaan keluarga berencana	Internal	Informasi yang di terima oleh masyarakat menjadi tidak optimal	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat

			Pelaporan	Dokumen Pelaporan tidak sesuai standar	ROO.1.06.2.08.2.14.01.16	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tidak adanya format baku terkait laporan penyuluhan	Internal	Kualitas Laporan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana kurang memuaskan	1. Dinas SosialP3AP2KB
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat : 41 %								
	Sub Kegiatan 2.1 : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya : 13 Laporan	Persiapan/ perencanaan/ penganggaran	Permintaan Alat dan Obat Kontrasepsi tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.1.06.2.08.2.14.01.17	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum adanya pelatihan terhadap perhitungan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Internal	Alat dan Obat kontrasepsi yang tersedia tidak mencukupi atau berlebih	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Faskes 3. Masyarakat PUS (Pasangan Usia Subur)
Pelaksanaan			Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi digudang alokon Kabupaten Kepulauan Meranti tidak mencukupi untuk di salurkan ke Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya	ROO.1.06.2.08.2.14.01.18	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Keterlambatan dalam pengiriman logistik Obat dan Alat Kontrasepsi dari BKKBN pusat ke Gudang Alokon di Daerah	Eksternal	Terjadi keterlambatan distribusi alokon dari Gudang Alokon Daerah ke faskes dan jejaringnya	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Faskes 3. Masyarakat PUS (Pasangan Usia Subur)	
Pelaporan			Laporan Alat dan Obat Kontrasepsi tidak akurat	ROO.1.06.2.08.2.14.01.19	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan dari Faskes tidak sesuai jadwal	Eksternal	Keterlambatan dalam penyampuan Laporan Alokon ke pusat	1. Dinas SosialP3AP2KB	
	Sub Kegiatan 2.2 : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persiapan/ perencanaan/ penganggaran	Perhitungan target sasaran orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak akurat	ROO.1.06.2.08.2.14.01.20	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum adanya SOP terkait Perhitungan target sasaran orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Internal	target yang di tetapkan tidak terealisasi	1. Dinas SosialP3AP2KB

			Pelaksanaan	Jumlah SDM yang terlatih untuk pemasangan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih sedikit	ROO.1.06.2.08.2.14.01.2 1	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurangnya pelatihan terkait pemasangan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kepada tenaga kesehatan	Eksternal	Jumlah Masyarakat yang terlayani untuk penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak banyak	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Masyarakat PUS (Pasangan Usia Subur)
7	Program : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG dan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan : 40%								
	Kegiatan 1 : Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota : 50%								
	Sub Kegiatan 1.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota : 1 Dokumen	Persiapan/ perencanaan/ panganggaran	Kurangnya SDM yang berkompeten dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelaksanaan PUG	ROO.1.06.2.08.2.14.01.2 2	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melatih TIM POKJA PUG dalam menyusun RAD pelaksanaan PUG	Internal	Kurangnya Nilai RAD dalam Penilaian Evaluasi APE	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. POKJA PUG
			Pelaksanaan	Keterlambatan dalam penyusunan Dokume Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan PUG	ROO.1.06.2.08.2.14.01.2 3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kurangnya SDM yang berkompeten dalam Penyusunan RAD Pelaksanaan PUG	Eksternal	Kurangnya Nilai RAD dalam Penilaian Evaluasi APE	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. POKJA PUG
	Kegiatan 2 : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota : 100%								

	Sub Kegiatan 2.1 : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas : 100 Orang	Pelaksanaan	Kurangnya Informasi mengenai perempuan diruang Publik	ROO.1.06.2.08.2.14.01.24	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang memahami tugas dan fungsinya tidak banyak	Internal	Minimnya Keterlibatan Perempuan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
8	Program : Program Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif : 100%								
	Kegiatan 1 : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Ratio KDRT : 0,006 %								
	Sub Kegiatan 1.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota : 20 Layanan	Pelaksanaan	Terlambatnya Layanan Pendampingan terhadap Perempuan korban kekerasan	ROO.1.06.2.08.2.14.01.25	Kepala UPTD PPA	Tidak tersedianya Tenaga Ahli yang menangani Pelayanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti	Internal	Layanan Pendampingan yang diberikan membutuhkan waktu cukup lama dari yang sudah ditetapkan	1. Dinas SosialP3AP2KB 2. Perempuan Korban Kekerasan
9	Program : Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan komprehensif : 100%								

Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang di sediakan : 100%								
Sub Kegiatan 1 :	Jumlah AMPK yang	Pelaksanaan	Terlambatnya Layanan Pendampingan	ROO.1.06.2.	Kepala UPTD PPA	Tidak tersedianya Tenaga Ahli yang	Internal	Layanan Pendampingan yang di	1. Dinas

Selatpanjang, 20 Desember 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



SUKKI, SE
NIP. 19800401 200012 1 001

Selatpanjang, 20 Desember 2023

Dibuat Oleh Pemilik Risiko :

1. Kepala Bidang Sosial

NURHABIBI, SE
NIP. 19770122 201102 1 001

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DESY MUSLIKA SANDRA, S.Sos
NIP. 19821212 201001 2 043

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

NURHAYANTO, S.Pd.SD
NIP. 19680512 199303 1 010

4. Kepala UPTD PPA

Dra. KAMISAH, M.Pd.I
NIP. 196902191994012001

Hasil Analisis Risiko

Nama Penda	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Nama OPD	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesetaraan Gender
Urusan Pemerintahan	: 1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Sosial) 2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada		Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
I	Risiko Strategis OPD										
1	Belum maksimalnya pemetaan jumlah Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menyebabkan masih adanya Komunitas Adat Terpencil yang belum Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah	RSO.1.06.2.08.2.14.0 1.01	3	3	14	Melakukan Penjajakan Awal Studi Kelayakan (PASK), Bimbingan Sosial dan Semiloka Daerah	Minimnya Jumlah anggaran yang di alokasikan untuk melakukan Penjajakan awal Studi Kelayakan	3	2	11	x
2	Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum maksimal	RSO.1.06.2.08.2.14.0 1.0	4	2	13	Meningkatkan Koordinasi dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk memberikan Pembekalan terkait pentingnya Peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah	Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang berpulau-pulau sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengumpulkan PSKS di satu titik	3	2	11	x
3	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia Terlantar yang terdata untuk pelayanan Rehabilitasi Sosial belum semuanya mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	RSO.1.06.2.08.2.14.0 1.03	4	4	19	Melakukan Verifikasi dan Validasi ulang terkait data Penyandang Disabilitas dan Lansia Terlantar yang memang layak untuk mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	Belum Optimalnya Verifikasi dan validasi data yang di lakukan	3	3	14	√
4	Masih adanya Keluarga Penerima Manfaat yang belum mendapatkan bantuan	RSO.1.06.2.08.2.14.0 1.04	4	4	19	Meningkatkan Verifikasi dan Validasi data terkait Pengajuan Usulan bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat yang terdata di dalam data DTKS ke Pemerintah Pusat	Penerima bantuan dilakukan By Sistem secara Random, sehingga usulan yang diajukan tidak serta merta langsung menjadi penerima bantuan dari pemerintah pusat	3	4	16	√

5	Keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	RSO.1.06.2.08.2.14.0 1.05	3	3	14	Meningkatkan Peran serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam menindak lanjuti dengan cepat segala hal yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kuantitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang benar-benar memahami tugas dan fungsinya masih kurang	3	2	11	x
6	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen GDPK yang di manfaatkan untuk pengambilan ke bijakan	RSO.1.06.2.08.2.14.0 1.06	2	3	10	Mengoptimalkan Koordinasi dengan stakeholders terkait penyusunan dokumen GDPK	Susahnya dalam harmonisasi waktu pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder terkait	2	2	7	x
7	Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi digudang alokon Kabupaten Kepulauan Meranti tidak mencukupi untuk di salurkan ke Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya	RSO.1.06.2.08.2.14.0 1.07	4	2	13	Mempercepat permintaan dan jadwal pengiriman Alat dan Obat Kontrasepsi	Letak Geografis Kabupaten Kepulauan meranti yang berpulau-pulau sehingga membutuhkan waktu cukup lama dalam penyaluran Alokon dari Pusat ke Daerah	3	2	11	x
8	Masih Rendahnya Pemahaman dan dukungan dari pada Stake Holder dalam pelaksanaan PUG	RSO.1.06.2.08.2.14.0 1.09	2	5	15	Melakukan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) termasuk PPRG kepada Tim POKJA PUG daerah	Kurangnya Jumlah Anggaran yang di alokasikan untuk melakukan Advokasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG	2	4	12	√
9	Belum Optimalnya Layanan Perlindungan Perempuan yang di berikan	RSO.1.06.2.08.2.14.0 1.10	3	3	14	Mendatangkan Tenaga Ahli Untuk menangani Pelayanan Perlindungan Perempuan dari Luar Daerah	Untuk mendatangkan Tenaga Ahli dari Luar Membutuhkan waktu yang lebih	2	3	10	x
10	Belum Optimalnya Layanan Perlindungan Khusus Anak yang di berikan	RSO.1.06.2.08.2.14.0 1.11	3	3	14	Mendatangkan Tenaga Ahli Untuk menangani Pelayanan Perlindungan Khusus Anak dari Luar Daerah	Untuk mendatangkan Tenaga Ahli dari Luar Membutuhkan waktu yang lebih	2	3	10	x
II Risiko Operasional											
	Keterlambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT)	ROO.1.06.2.08.2.14. 01.01	2	3	10	Meningkatkan Koordinasi Dengan LKS terkait penyediaan bahan-bahan yang di perlukan dalam pemberdayaan KAT	Tidak tersedianya bahan-bahan yang di perlukan dalam pemberdayaan KAT di lokasi Kegiatan	2	2	7	x

Jumlah KAT yang mendapatkan Peningkatan kapasitas tidak sesuai dengan total seluruh Perkiraan Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di kabupaten Kepulauan Meranti	ROO.1.06.2.08.2.14.01.02	3	3	14	Melakukan Verifikasi dan Validasi data Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang masuk Kategori penerima Pemberdayaan	Minimnya Informasi terkait Sebaran Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2	3	10	x
Peserta Bimbingan Teknis terkait Peningkatan Kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat kurang memahami terkait tugas dan fungsi dari pada Pekerja Sosial Masyarakat tersebut	ROO.1.06.2.08.2.14.01.03	2	3	10	Membuat dan Mensosialisasikan petunjuk Pelaksanaan terkait tugas dan fungsi dari pada Pekerja Sosial Masyarakat	Letak Geografis Kabupaten Kepulauan meranti yang berpulau-pulau sehingga membutuhkan waktu melakukan sosialisasi ke seluruh desa	2	2	7	x
Waktu Penyaluran Permakanan kepada Penyandang Disabilitas dan Lansia tidak sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan	ROO.1.06.2.08.2.14.01.04	3	3	14	Menggunakan Transportasi Umum dalam penyaluran bantuan Permakanan	Sulitnya Akses kelokasi penyaluran bantuan	2	3	10	x
Waktu Penyaluran Sandang kepada Penyandang Disabilitas dan Lansia tidak sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan	ROO.1.06.2.08.2.14.01.05	3	3	14	Menggunakan Transportasi Umum dalam penyaluran bantuan Permakanan	Sulitnya Akses kelokasi penyaluran bantuan	2	3	10	x
Barang tidak sesuai dengan Penerima Manfaat	ROO.1.06.2.08.2.14.01.06	3	2	11	Koordinasi dengan Pekerja Sosial Kementerian terkait Penyediaan Alat Bantu Disabilitas dan Lansis serta Melakukan Assesment jauh hari sebelum kegiatan di laksanakan	Waktu yang di perlukan untuk melakukan Assesment menjadi cukup lama terkendala akses kelokasi penerima bantuan	2	2	7	x
Keterlambatan dalam penyediaan kelengkapan administrasi pemberian layanan rujukan	ROO.1.06.2.08.2.14.01.07	2	3	10	Menyebarkan Informasi melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada terkait Administrasi yang di perlukan dalam pemberian layanan Rujukan	Informasi yang di berikan bisa kemungkinan tidak akurat karena ti dak di sertai dengan sebaran	2	2	7	x
Keterlambatan dalam penyediaan kelengkapan administrasi pemberian layanan rujukan	ROO.1.06.2.08.2.14.01.08	2	3	10	Menyebarkan Informasi melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Stake Hoder yang ada terkait Administrasi yang di perlukan dalam pemberian layanan Rujukan	Informasi yang di berikan bisa kemungkinan tidak akurat karena ti dak di sertai dengan sebaran	2	2	7	x

Pendataan yang di lakukan kepada Fakir Miskin tidak tepat sasaran	ROO.1.06.2.08.2.14.01.09	3	4	16	Mensosialisasikan terhadap Perangkat Desa terkait Kriteria Masyarakat yang bisa dimasukkan kedalam data DTKS	Sosialisasi yang di lakukan tidak di sertai dengan regulasi atau aturan yang mengatur tentang kriteria Masyarakat miskin yang boleh di masukkan ke dalam data DTKS	3	3	14	√
Laporan pendamping PKH yang disampaikan ke dinas belum optimal	ROO.1.06.2.08.2.14.01.10	3	2	11	Menyiapkan Format baku untuk pelaporan kinerja dari pada Pendamping PKH ke Dinas Sosial	Belum adanya Reverensi terkait Format laporan kinerja Pendamping PKH yang baku	3	1	5	x
Adanya Masyarakat miskin yang menerima bantuan Sosial Ganda baik dari Pemerintah Pusat Maupun Pemerintah Daerah	ROO.1.06.2.08.2.14.01.11	3	3	14	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebelum bantuan tersebut di serahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi sasaran kegiatan	Data DTKS yang bergerak dinamis yang mengharuskan Verifikasi dan Validasi data harus dilakukan secara rutin	3	2	11	x
Keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	ROO.1.06.2.08.2.14.01.12	3	3	14	Meningkatkan Peran serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam menindak lanjuti dengan cepat segala hal yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Sulitnya Akses kelokasi penyaluran bantuan	3	2	11	x
Keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Logistik Kepada Korban Bencana	ROO.1.06.2.08.2.14.01.13	3	3	14	Meningkatkan Peran serta Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam menindak lanjuti dengan cepat segala hal yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Sulitnya Akses kelokasi penyaluran bantuan	3	2	11	x
Minimnya narasumber yang tersedia di OPD	ROO.1.06.2.08.2.14.01.14	2	3	10	Mendatangkan Narasumber dari Luar Perangkat Daerah yang memiliki Kompetensi	Sulitnya harmonisasi waktu yang pas dengan Narasumber	1	2	2	x
Kualitas Penyuluhan yang di berikan tidak sesuai standar	ROO.1.06.2.08.2.14.01.15	2	3	10	Meningkatkan pengetahuan petugas terhadap standar pembinaan Keluarga Berencana	Menyiapkan Standar Materi yang di gunakan dalam Penyuluhan Pembinaan Keluarga Berencana	2	2	7	x
Dokumen Pelaporan tidak sesuai standar	ROO.1.06.2.08.2.14.01.16	2	2	7	Menyiapkan Format baku yang di gunakan untuk pelaporan	Belum adanya Reverensi terkait Format laporan yang baku	2	1	3	x

Permintaan Alat dan Obat Kontrasepsi tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.1.06.2.08.2.14.01.17	3	3	14	Meningkatkan SDM yang menangani perhitungan permintaan Alat dan Obat Kontrasepsi dengan mengikutsertakan kedalam pelatihan yang sesuai	Belum adanya informasi terkait pelatihan yang di perlukan	3	2	11	x
Ketersediaan obat dan alat kontrasepsi digudang alokon Kabupaten Kepulauan Meranti tidak mencukupi untuk di salurkan ke Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya	ROO.1.06.2.08.2.14.01.18	4	2	13	Mempercepat permintaan dan jadwal pengiriman Alat dan Obat Kontrasepsi kepada BKKBN perwakilan Riau	Letak Geografis Kabupaten Kepulauan meranti yang berpulau-pulau sehingga membutuhkan waktu cukup lama dalam penyaluran Alokon dari Pusat ke Daerah	3	2	11	x
Laporan Alat dan Obat Kontrasepsi tidak akurat	ROO.1.06.2.08.2.14.01.19	2	2	7	Meningkatkan Koordinasi dengan Faskes dan Jejaringnya untuk mempercepat penyampaian Laporan	Letak Geografis Kabupaten Kepulauan meranti yang berpulau-pulau sehingga membutuhkan waktu dari faskes untuk menyampaikan laporan	2	1	3	x
Perhitungan target sasaran orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak akurat	ROO.1.06.2.08.2.14.01.20	2	3	10	Membuat SOP terkait Perhitungan target sasaran orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Belum adanya Referensi SOP terkait Perhitungan target sasaran orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2	2	7	x
Jumlah SDM yang terlatih untuk pemasangan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih sedikit	ROO.1.06.2.08.2.14.01.21	3	3	14	Meningkatkan jumlah SDM yang terlatih untuk pemasangan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah pelatihan Peningkatan SDM yang terlatih untuk pemasangan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kurang	3	2	11	x
Kurangnya SDM yang berkompeten dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelaksanaan PUG	ROO.1.06.2.08.2.14.01.22	2	4	12	Melakukan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) termasuk PPRG kepada Tim POKJA PUG daerah	Belum Semua TIM POPJA PUG Daerah yang mendapatkan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk PPRG	2	3	10	x
Keterlambatan dalam penyusunan Dokume Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan PUG	ROO.1.06.2.08.2.14.01.23	3	3	14	Meningkatkan Komperensi SDM dalam Penyusunan Dokumen Rencana AKSI Daerah (RAD) pelaksanaan PUG	Minimnya jumlah pelatihan yang tersedia	2	3	10	x

	Kurangnya Informasi mengenai perempuan diruang Publik	ROO.1.06.2.08.2.14.01.24	2	3	10	Melakukan Peningkatan Kapasitas kepada Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Peningkatan kapasitas yang di berikan belum maksimal	2	2	7	x
	Terlambatnya Layanan Pendampingan terhadap Perempuan korban kekerasan	ROO.1.06.2.08.2.14.01.25	3	3	14	Mendatangkan Tenaga Ahli Untuk menangani Pelayanan Perlindungan Perempuan dari Luar Daerah	Untuk mendatangkan Tenaga Ahli dari Luar Membutuhkan waktu yang lebih	2	3	10	x
	Terlambatnya Layanan Pendampingan terhadap Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	ROO.1.06.2.08.2.14.01.26	3	3	14	Mendatangkan Tenaga Ahli Untuk menangani Pelayanan Perlindungan Khusus Anak dari Luar Daerah	Untuk mendatangkan Tenaga Ahli dari Luar Membutuhkan waktu yang lebih	2	3	10	x

Selatpanjang, 20 Desember 2023

Disetujui oleh :

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



NIP. 19800401 200012 1 001

Selatpanjang, 20 Desember 2023

Dibuat Oleh Pemilik Risiko :

1. Kepala Bidang Sosial

NURHABIBUSE

NIP. 19770122 201102 1 001

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DESY MUSIKA SANDRA, S.Sos

NIP. 198212 2 201001 2 043

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NURHAYANTO, S.Pd.SD

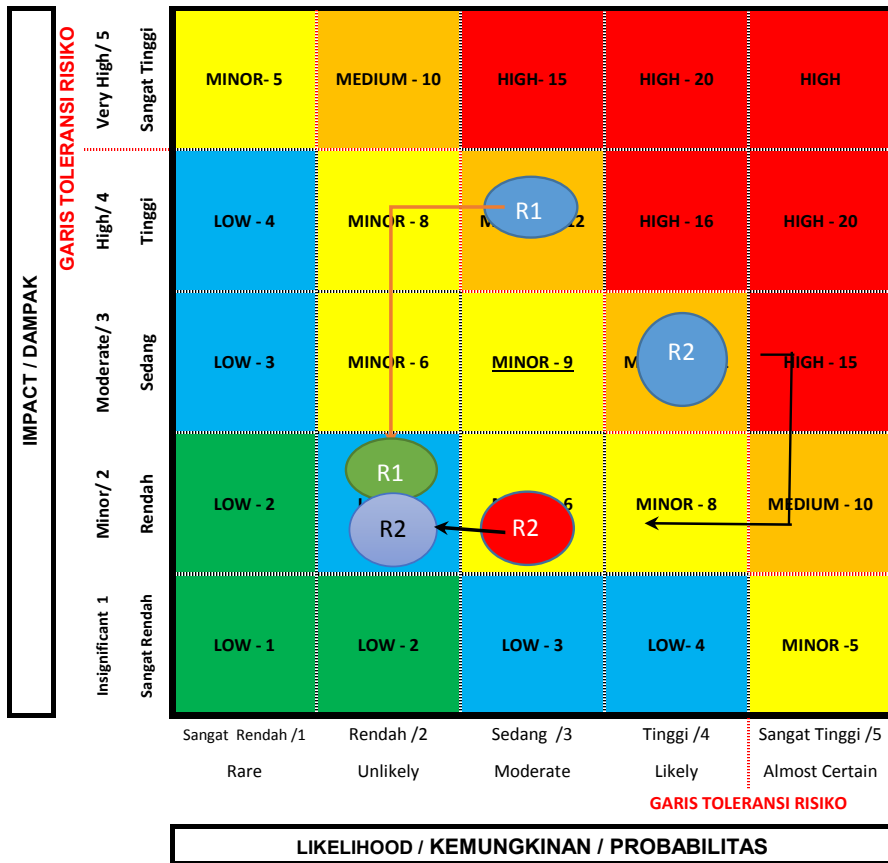
NIP. 19680512 199303 1 010

4. Kepala UPTD PPA

Dra.KAMISAH,M.Pd.I

NIP.196902191994012001

MATRIK RISIKO DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA/ Dampak



Tingkat kemungkinan

		Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
	Skala	1	2	3	4	5
Hampir pasti terjadi	5	9	15	18	23	25
sering terjadi	4	6	12	16	19	24
Kadang terjadi	3	4	10	14	17	22
Jarang terjadi	2	2	7	11	13	21
Hampir tidak pernah terjadi	1	1	3	5	8	20

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti				
Nama OPD		: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis		: 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 2. Meningkatkan Kesetaraan Gender				
Urusan Pemerintahan		: 1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Sosial) 2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Indikator Output	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
I	Risiko Strategis OPD					
1	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Lansia Terlantar yang terdata untuk pelayanan Rehabilitasi Sosial belum semuanya mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar	RSO.1.06.2.08.2.14.01.03	Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait anggaran yang dapat di alokasikan kedaerah untuk pelayanan rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas dan lansia yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti	Dinas Sosial, P3AP2KB	Laporan Hasil Koordinasi	Triwulan II-IV
2	Masih adanya Keluarga Penerima Manfaat yang belum mendapatkan bantuan	RSO.1.06.2.08.2.14.01.04	Memberikan bantuan sosial yang direncanakan melalui alokasi anggaran APBD kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam data DTKS yang belum mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Pusat	Dinas Sosial, P3AP2KB	Laporan Hasil Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial	Triwulan II-IV
3	Masih Rendahnya Pemahaman dan dukungan dari pada Stake Holder dalam pelaksanaan PUG	RSO.1.06.2.08.2.14.01.09	Menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait pelaksanaan PUG pada lembaga pemerintah di Kabupaten Kepulauan Meranti	Dinas Sosial, P3AP2KB	Dokume Rancana Aksi Daerah (RAD) yang tersusun	Triwulan II-IV
II	Risiko Operasional OPD					

1	Pendataan yang di lakukan kepada Fakir Miskin tidak tepat sasaran	ROO.1.06.2.08 .2.14.01.09	Mencari Reverensi dan menyusun Draft kebijakan yang mengatur tentang kriteria masyarakat miski yang dapat di masukkan kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Dinas Sosial, P3AP2KB	Draft Kebijakan yang mengatur tentang kriteria masyarakat miskin yang dapat di masukkan kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Triwulan II-IV
---	---	------------------------------	--	--------------------------	---	----------------

Selatpanjang, 20 Desember 2023

Disetujui oleh :

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Kabupaten Kepulauan Meranti



SUKRI, SE

NIP. 19800401 200012 1 001

Selatpanjang, 20 Desember 2023

Dibuat Oleh Pemilik Risiko :

1. Kepala Bidang Sosial

NURHABIBI, SE

NIP. 19770122 201102 1 001

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DESY MUSTIKA SANDRA, S.Sos

NIP. 19821212 201001 2 043

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NUR HAYANTO, S.Pd.SD

NIP. 19680512 199303 1 010

4. Kepala UPTD PPA

Dra. KAMISAH, M.Pd.I

NIP. 196902191994012001